

Sustainable Development Goals (SDGs): Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Indikator Persentase Tenaga Kerja Formal

Disusun oleh Ni Ketut Ananta Kusuma Dewi

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menurut Bappenas adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs merupakan lanjutan dari upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada tahun 2015 lalu.

SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan global. Salah satu tujuan dalam SDGs adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan tersebut tertera dalam tujuan ke-8 yaitu “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”. Tiap tujuannya memiliki beberapa target yang hendak dicapai. Target yang akan dibahas dalam makalah ini adalah menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan (Target 8.3) dengan indikator 8.3.1(a) yaitu persentase tenaga kerja formal.

II. PEMBAHASAN

2.1 Isu terkait Indikator dan Tujuan

Tujuan 8 hendak mencapai sebuah kondisi ideal yaitu seluruh warga negara, tanpa kecuali, akan memiliki kesempatan bekerja dan berpenghasilan, dengan kondisi kerja yang layak, dalam sebuah ekonomi yang berdaya saing dan tumbuh secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai isu yang terjadi.

Isu pertama, rendahnya modal manusia penduduk Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, terlihat dari data pendidikan angkatan kerja pada tahun 2016. Sebagian besar, yaitu 44,73 persen angkatan kerja berpendidikan SD dan SMP. Tantangan untuk meningkatkan kualitas modal manusia adalah minimnya anggaran untuk ketenagakerjaan dan kondisi sebagian besar balai latihan kerja (BLK) yang memprihatinkan (walaupun beberapa BLK berkualitas bagus seperti BBPLK Bekasi). Selain itu, belum ada kemitraan yang baik antara pemerintah dan swasta. Semua

situasi tersebut menunjukkan pembangunan modal manusia belum menjadi prioritas pemerintah.

Isu yang kedua, anggaran kementerian Kementerian Ketenagakerjaan sangat kecil dan terus mengalami penurunan alokasi. Pada tahun 2015, Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi sebesar Rp 5,25 triliun (0,26% dari APBN 2015), turun menjadi Rp 3,8 triliun (0,18% dari APBN 2016), dan turun lagi menjadi Rp 3,46 triliun (0,17% dari APBN 2017). Anggaran yang sangat kecil tersebut dialokasikan ke dalam berbagai program yang ada di 7–9 unit organisasi. Bahkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti untuk BLK, program pemagangan dan lainnya, kurang dari Rp 1,5 triliun. Sementara banyak daerah yang tidak membelanjakan anggarannya sesuai dengan jadwal dan lebih memilih menyimpannya di deposito yang angkanya mencapai Rp 250 triliun pada September 2017 (Infid, 2018).

2.2 Rencana Aksi Nasional dan Daerah

Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif dalam menginisiasi SDGs berkomitmen untuk mendukung kesepakatan global tersebut untuk mewujudkan pembangunan adil, damai, dan berkelanjutan. Salah satu komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Rencana Aksi Nasional (RAN). RAN adalah dokumen rencana kerja tingkat nasional untuk mencapai SDGs sesuai dengan sasaran nasional. Kemudian, terdapat pula dokumen rencana kerja tingkat daerah untuk mencapai SDGs sesuai dengan sasaran daerah yang disebut dengan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Penyusunan RAN mengacu pada beberapa dokumen yaitu RPJMN Tahun 2015–2019, Renstra K/L Tahun 2015–2019, RKP Tahun 2016 dan 2017, dan dokumen kebijakan lain yang terkait. Kebijakan RPJMN 2015–2019 yang sesuai dengan Tujuan 8 SDGs adalah sebagai berikut (Bappenas, 2017).

- (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
- (ii) Pemasaran pariwisata nasional
- (iii) Pembangunan industri pariwisata
- (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata
- (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial
- (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan
- (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif
- (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank
- (x) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

Penyusunan RAD untuk daerah dapat disesuaikan dengan tantangan, kapasitas, dan kemampuan masing-masing daerah berdasarkan RAN yang telah dipaparkan di atas. Berikut ini merupakan contoh program kerja yang disusun dalam RAD

Tabel 1. Contoh Penerapan RAD di daerah

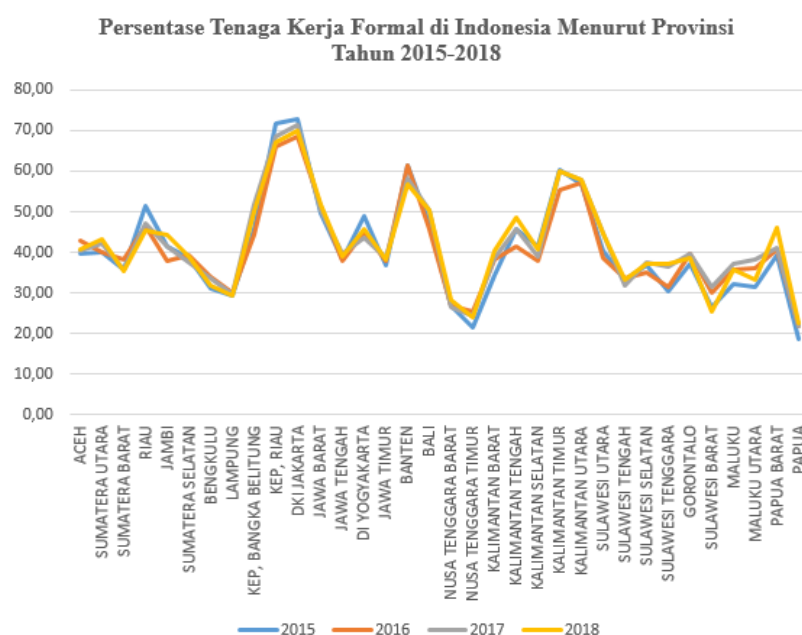
Rencana Aksi	Program	SKPD Pelaksana
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah tenaga kerja formal minimal 75% dari angkatan kerja 2. Perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/subsektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/subsektor yang produktivitasnya tinggi minimal 50% tenaga kerja usia produktif 	Dinas Tenaga Kerja

2.3 Trend Pencapaian Target

Berikut ini merupakan matriks ringkasan *trend* pencapaian target dan indikator SDGs yang dibahas dalam makalah ini.

Tabel 2. Matriks ringkasan pencapaian target dan indikator tahun 2015-2018 dalam persen

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Indikator 8.3.1(a) Persentase Tenaga Kerja Formal	42,25 (2015)	42,40	42,97	43,16	Kementerian Ketenagakerjaan



Gambar 1. Grafik Persentase Tenaga Kerja Formal di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2015-2018
Sumber: BPS, diolah.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja formal di beberapa provinsi cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dan mengalami fluktuasi dimana persentase terendah di Provinsi Papua dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2018. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara masing-masing daerah di Indonesia sehingga belum sesuai dengan prinsip “*No-one Left Behind*” yang dicanangkan oleh SDGs.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada makalah ini, adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Terdapat beberapa isu yang terjadi terkait dengan penerapan Tujuan 8 SDGs khususnya target 8.3. indikator persentase tenaga kerja formal, diantaranya:
 - a) Rendahnya modal manusia penduduk Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN/
 - b) Anggaran kementerian Kementerian Ketenagakerjaan sangat kecil dan terus mengalami penurunan alokasi
2. Salah satu cara Indonesia untuk mendukung penerapan SDGs di Indonesia adalah Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD). RAN disusun mengacu pada beberapa dokumen yang salah satunya adalah RPJMN Tahun 2015-2018 sedangkan RAD disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan RAN sesuai dengan tantangan, kemampuan, dan kapasitas masing-masing daerah.
3. *Trend* pencapaian target dapat digambarkan dengan persentase tenaga kerja formal menurut provinsi di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.

3.2 Saran

Tenaga kerja formal merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung Tujuan 8 SDGs sehingga diperlukan upaya maksimal dalam penerapan kebijakan terkait SDGs seperti RAN dan RAD oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. “*Apa itu SDGs?*”. Retrieved from: <https://sdgs.bappenas.go.id>
- Bappenas. “*Draf Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB*”. Retrieved from: https://www.bappenas.go.id/files/7714/6673/2701/20160623_Penjelasan_Draft_Pedoman_Teknis_Perumusan_RAN_TPB.pdf
- BPS. “*Tabel Dinamis Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi, 2015-2018*”. Retrieved from <https://bps.go.id/site/resultTab>
- Infid. (2018). *Panduan Teknis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Lapangan Kerja yang Layak*. Jakarta: Infid.